

**PERAN LEMBAGA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG  
DISABILITAS (STUDY KASUS YAYASAN PILAR DI KABUPATEN  
PURBALINGGA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh: Achmad Hisyam**

**NIM. 16230066**

**Pembimbing: Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si**

**NIP. 198308112011012010**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-932/Un.02/DD/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEMBAGA SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI YAYASAN PILAR KABUPATEN PURBALINGGA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD HISYAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 16230066  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 647d9789e997



Penguji I  
Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 648181f1648e9



Penguji II  
Ahmad Izudin, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6481827017a21



Yogyakarta, 31 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 648183b519537



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Hisyam  
NIM : 16230066  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang  
Disabilitas Studi Kasus Di Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga

Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing,

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si.

NIP 198308112011012010

Mengetahui:

Ketua Prodi,

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si

NIP 198308112011012010

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Hisyam  
NIM : 16230066  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Peran Lembaga Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus DI Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 31 Mei 2023

Mengetahui,  
Yang menyatakan,



Achmad Hisyam  
NIM. 16230066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua alm Lukman Yusuf (Ayah) dan Sopiayah (Ibu) yang selalu memberikan saya motivasi dan doa terbaik serta menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan studi.

Kakak-kakak yang telah membantu dan segenap keluarga yang selalu mengingatkan serta memberi doa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.

Almamamater UIN Sunan Kalijaga selaku tempat untuk saya menempuh studi sehingga bisa mendapatkan gelar sarjana nantinya.

Teman – teman seperjuangan yang sudah banyak memberikan dukungan dan motivasi supaya saya segera menyelesaikan studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak pernah ada yang sempurna. Tinggal bagaimana mensyukuri atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Semua sama, tidak ada yang berbeda dimata sang Pencipta

“Achmad Hisyam Yogyakarta, 25 Mei 2023”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul; Peran Lembaga Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga. Tidak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, yang telah melimpahkan syafaat bagi umatnya kelak.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapat banyak semangat dan dukungan baik dalam bentuk informasi, kritik, saran serta masukan-masukan dari banyak pihak. Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. Dengan banyak mengucapkan terima kasih setulusnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Mahrumah, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Aminah S. Sos. M.Si, selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dosen Pembimbing Skripsi serta menjadi Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan banyak dukungan secara moril dan telah memberi masukan, kritik serta saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada seluruh Dosen PMI UIN Suka Yogyakarta, penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi pengganti orang tua saat berada di Kampus yang luar biasa telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Semoga apa yang telah diajarkan kepada saya menjadi amal jariyah bagi beliau-beliau. Amin.
5. Kepada Ibu Yuni selaku ketua Yayasan Pilar yang telah meberikan informasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi.
6. Kepada teman – teman UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan
7. Kepada teman – teman PPM khususnya Ridwan, Arvian yang menjadi keluarga baru sementara di waktu PPM penulis.
8. Teman – teman KKN Dusun Nglengkong, yang sudah menjadi bagian keluarga kecil satu atap baru Arini, Iqbal, Hana, Syafira, Rizal, Alif, yang telah mengajarkan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **ABSTRAK**

Achmad Hisyam (Nim. 16230066). *Peran Lembaga sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2023.

Purbalingga merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai penyandang disabilitas sebanyak 9.581 jiwa. Kesejahteraan penyandang disabilitas merupakan kebutuhan utama yang sering dikesampingkan oleh masyarakat dan pemerintah. Peran lembaga sosial dalam membantu pemberdayaan sangat dibutuhkan, khususnya bagi penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori kelompok rentan ini. Hadirnya peran Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga dalam pemberdayaan disabilitas mampu memberikan kemandirian dan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas

Tahap Assessment, Tahap Perencanaan, Tahap Implementasi, Tahap Evaluasi, dan Tahap Terminasi yang terlaksana dalam proses pemberdayaan Yayasan Pilar merupakan indikator terselenggaranya peran Lembaga dalam pemberdayaan disabilitas. Adanya program pemberdayaan dalam Yayasan Pilar ini memberikan dampak sosial ekonomi pada disabilitas yang diberdayakan. Dampak sosial budaya yang timbul setelah berjalannya pemberdayaan membuat disabilitas lebih baik.

Adapun hasil penelitian melihat fakta pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Pilar menguatkan bukti sudah berdayanya penyandang disabilitas. Hal ini terbukti dengan terdapat pelaksanaan tahapan pemberdayaan yang sistematis sudah dilalui dan meningkatnya kesejahteraan, partisipasi sosial dan menumbuhkan tingkat kepercayaan diri penyandang disabilitas.

***Kata kunci: tahapan pemberdayaan dan dampak pemberdayaan.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

Achmad Hisyam (NIM. 16230066). The Role of Social Institutions in Empowering People with Disabilities in Purbalingga Regency. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da'wah and Communication. Sunan Kalijaga State Islamic University. 2023.

Purbalingga is one of the regencies in Central Java which has 9,581 people with disabilities. The welfare of persons with disabilities is a major need that is often neglected in the society and the government. The role of social institutions in assisting empowerment is urgently needed, especially for people with disabilities who in the category of vulnerable groups. The presence of the role of the Pilar Foundation (Yayasan Pilar) in Purbalingga Regency in empowering people with disabilities is able to provide independence and well-being for people with disabilities

The Assessment Stage, Planning Stage, Implementation Stage, Evaluation Stage, and Termination Stage which were carried out in the Pilar Foundation empowerment process are indicators of the institution's role in empowering people with disabilities. The existence of an empowerment program within the Pilar Foundation has a socio-economic impact on empowered disabilities. The socio-cultural impact that arises after the empowerment takes place makes people with disabilities better.

The results of the research looking at the facts of empowerment carried out by the Pilar Foundation strengthen the evidence that people with disabilities have become empowered. This is proven by the systematic implementation of stages of empowerment that have been passed and increased welfare, social participation and growing the level of confidence of people with disabilities.

Keywords: stages of empowerment and impact of empowerment.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                          | I   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                     | II  |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....              | III |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....      | IV  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                     | V   |
| MOTTO .....                                  | VI  |
| KATA PENGANTAR.....                          | VII |
| ABSTRAK .....                                | IX  |
| DAFTAR ISI.....                              | X   |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                    | 1   |
| Penegasan Judul.....                         | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 3   |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 6   |
| E. Kajian Pustaka.....                       | 9   |
| F. Kajian Teori .....                        | 12  |
| G. Metode Penelitian.....                    | 28  |
| H. Sistematika Pembahasan .....              | 35  |
| BAB II : GAMBARAN UMUM.....                  | 37  |
| A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian ..... | 37  |
| B. Gambaran Umum Yayasan Pilar.....          | 41  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III : PROSES DAN DAMPAK PEMBERDAYAAN OLEH YAYASAN<br/>PILAR TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN<br/>PURBALINGGA.....</b> | <b>52</b> |
| <b>A. Peran Lembaga Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas .....</b>  | <b>52</b> |
| <b>1. Tahap Assessment .....</b>   | <b>53</b> |
| <b>2. Tahap Perencanaan .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>3. Tahap Implementasi .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>4. Tahap Evaluasi .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>5. Tahap Terminasi .....</b>  | <b>65</b> |
| <b>B. Dampak Pemberdayaan Terhadap Penyandang Disabilitas.....</b>   | <b>67</b> |
| <b>1. Dampak Sosial Ekonomi .....</b>  | <b>67</b> |
| <b>2. Dampak Sosial Budaya.....</b>  | <b>73</b> |
| <b>3. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>   | <b>81</b> |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>  | <b>86</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>   | <b>86</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>88</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>90</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>93</b> |

**Daftar Tabel**

**Table 1 Luas Wilayah Kabupaten Purbalinga..... 38**

**Table 2 Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga ..... 54**



## Daftar Gambar

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gambar 1 Struktur Organisasi Yayasan Pilar.....</b> | <b>43</b> |
| <b>Gambar 2 Pelatihan Pembuatan Abon Sapi.....</b>     | <b>58</b> |
| <b>Gambar 3 Pelaksanaan Workshop Woodcraft .....</b>   | <b>60</b> |
| <b>Gambar 4 Pelaksanaan Pelatihan Ecoprint .....</b>   | <b>62</b> |
| <b>Gambar 5 Pelatihan Ecoprint tahun 2023 .....</b>    | <b>94</b> |
| <b>Gambar 6 Pelatihan Digital Marketing .....</b>      | <b>95</b> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Penegasan Judul**

Judul skripsi ini adalah “*Peran Lembaga Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga*”, untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya penjabaran tentang beberapa istilah yang dimaksud. Istilah-istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” istilah pemberdayaan berasal dari “*daya*” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil.<sup>1</sup> Sedangkan dalam penelitian ini pemberdayaan yang dimaksud adalah usaha atau cara peran Lembaga Yayasan Pilar untuk memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas agar mereka bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Penyandang disabilitas

Merujuk pada UU No 8 Tahun 2016 Pasal 1, disabilitas dapat dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 324.

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Pasal 1 mengatakan bahwa penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki kelainan atau penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.<sup>2</sup>

### 3. Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga

Yayasan Pilar adalah salah satu lembaga sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga, Yayasan ini dirancang untuk menjadi wadah dalam mengembangkan kreativitas dan apresiasi, serta ajang untuk berkontribusi dan turut serta membangun serta memajukan Purbalingga.

Berdasarkan penjelasan istilah diatas, maka maksud dari judul “Peran Lembaga Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga” adalah membahas tentang peran pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Pilar di Kabupaten Purbalingga terhadap para penyandang disabilitas melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan, dengan tujuan agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan selanjutnya.

---

<sup>2</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, diakses pada tanggal 30 April 2023 jam 19.00



## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar, yakni 265 juta jiwa<sup>3</sup>, memiliki kompleksitas masalah yang beragam, bahkan cenderung rumit. Selain masyarakat yang berada digaris kemiskinan yang berjumlah 25,95 juta jiwa, juga beragam masalah lain. Salah satunya adalah nasib kelompok rentan yang masih cukup besar, seperti kaum perempuan, anak, hingga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan dan kerap kali menghadapi berbagai keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan. Hingga saat ini data penyandang disabilitas menurut sensus (SUPAS) tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS), di Indonesia terdapat 8,56 % penyandang disabilitas dari total populasi penduduk (sekitar 22 juta orang). Kemudian data Kementerian Tenaga Kerja tahun 2013 menyebutkan bahwa diantara sekian banyak penyandang disabilitas yang menganggur, 23,9 % diantaranya merupakan penyandang disabilitas yang berstatus kepala rumah tangga.<sup>4</sup>

Peran pemberdayaan pemerintah terhadap penyandang disabilitas sudah mulai terlihat dengan adanya Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun kebijakan turunan lainnya, serta sarana dan prasarana yang terkait dengan penyandang disabilitas terus berkembang. Berbagai usaha pemerintah untuk melakukan pemberdayaan disabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak sebelum era reformasi. Hal ini terlihat terbitnya berbagai

---

<sup>3</sup> Badan pusat statistic 2018, (Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia) <https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>, diakses pada tanggal 30 April 2023 jam 19.30.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistika 2018. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018.

peraturan yang terbentuk yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1998 tentang Upaya Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (1997/1998): secara khusus mengatur penyandang disabilitas. Kedua Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Jauh sebelumnya pemerintah juga meratifikasi *Convention in The Right Person with Disabilities (CRPD)* yang sudah diundangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Produk hukum tersebut merupakan salah satu bukti upaya pemerintah dalam mengurangi kesejahteraan dan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Salah satu tertuang pada Pasal 91 yang berbunyi:

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”*,

Lebih jauh lagi, terkait mekanisme pemberdayaan secara jelas disebutkan dalam pasal 94 bahwa pemberdayaan sosial dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui; Satu, peningkatan kemauan dan kemampuan; Kedua, penggalan potensi dan sumber daya; Ketiga, penggalan nilai dasar; Keempat, pemberian akses; Kelima, pemberian bantuan usaha. Pemberian usaha sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berbagai bentuk, antara lain diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan pendampingan, serta pemberian stimultan. Selain itu, juga dapat melalui peningkatan akses pemasaran hasil usaha, penguatan kelembagaan dan kemitraan, serta bimbingan lanjut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada kenyataannya kelompok penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sah yang memiliki hak, serta kewajiban yang sama. Bahkan mereka membutuhkan kebutuhan yang khusus menyesuaikan dengan sisi ketidak sempurnaan yang ada pada diri masing-masing penyandang disabilitas. Tidak mudah untuk bersosialisasi dengan masyarakat, masih membutuhkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, tetapi sebelum menuju ke arah itu penyandang disabilitas kerap kali dipandang sebelah mata dianggap berbeda oleh masyarakat lainnya. Bahkan lebih jauh lagi, masyarakat banyak yang tidak menyadari atas persamaan hak sesama warga negara Indonesia, dengan penolakan dan anggapan miris mendiskriminasi bahwasannya penyandang disabilitas berbeda. Berangkat keresahan tersebut perlu adanya pemberdayaan yang massif dilakukan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan tahapan untuk tercapainya kemandirian masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

Pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam memperoleh haknya. Seperti, dalam bidang pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, rasanya belum memiliki program nyata yang perlu dikritisi dan di kedepankan. Pengembangan ekonomi kerakyatan, entah itu pendekatan jalur pemberian kredit fasilitas bagi sektor informal atau mikro, maupun melalui usaha kecil menengah masih belum terlihat nyata menyentuh

hajat hidup penyandang disabilitas.<sup>6</sup> Para penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan yang diskriminatif, tidak saja dari lingkungan, masyarakat, dan negara. Dalam lingkup yang terdekat, yakni keluarga masih memperlakukan penyandang disabilitas dalam kapasitas yang cenderung diskriminatif. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berintegrasi dengan masyarakat. Seperti halnya bersosial, hambatan kultur maupun etnis, telah menyebabkan penyandang disabilitas tidak memiliki hak akses hidup yang layak dan sejajar dengan masyarakat lain yang non-disabilitas.

Berangkat dari latar belakang di atas, yakni fakta bahwa penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, peneliti tertarik untuk mengangkat isu penyandang disabilitas, terutama disektor pemberdayaan. Peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait peran yang dilakukan oleh Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemilihan lokasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, isu disabilitas di Kabupaten Purbalingga belum terlalu massif, bahkan di Kabupaten ini baru lahirnya Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2019 yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, probabilitas tantangannya lebih besar dibandingkan daerah lain, misalnya di Yogyakarta yang sudah lama memiliki Perda, Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) penyandang disabilitas, dan lain-lain. Kedua, Yayasan Pilar merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat

---

<sup>6</sup> Ani Surwati, Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 5-1* (Maret 2014), hal. 43.

<sup>7</sup> Wawancara Ibu Yuni pada tanggal 3 November 2019 pada pukul 12.15 WIB.

independen, nirlaba dan non partisipan. Ketiga, gerakan isu disabilitas di Purbalingga sudah mulai tumbuh dan terlihat, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi kebijakan untuk gerakan disabilitas. Terakhir, sejauh ini belum peneliti temukan penelitian yang menyangkut isu disabilitas di Kabupaten Purbalingga.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini disajikan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemberdayaan disabilitas oleh Yayasan Pilar di Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara rinci dan detail mengenai hal-hal berikut :

1. Untuk mempelajari dan mendeskripsikan peran pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Pilar.
2. Untuk menjelaskan peran Yayasan Pilar dalam pengaruh pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga manfaat, yakni ;

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan :
  - a. Dapat memberikan kontribusi bagi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya Universitas Islam Negeri Yogyakarta dalam mengembangkan pengetahuan terkait pemberdayaan penyandang disabilitas.
  - b. Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi dan tambahan pengetahuan dalam kerangka penelitian lainnya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan :
  - a. Memberikan pengetahuan penyadaran kepada masyarakat luas, untuk lebih mempedulikan masalah sosial terkhusus pada penyandang disabilitas.
  - b. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman pemahaman terkhusus pada peneliti.
  - c. Dapat menjadi sumber data dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.
  - d. Menciptakan design yang ideal dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, khususnya di Kabupaten Purbalingga.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sudah ada. Dengan memilih kajian judul yang hampir sama seperti apa yang akan peneliti teliti sebelum penelitian lebih lanjut dan kemudian akan ditulis menjadi sebuah karya ilmiah. Diantaranya :

*Pertama*, skripsi yang ditulis Indah Apriliyani dengan penelitian tentang “*Pemberdayaan Penyandang Cacat melalui Pelatihan Menjahit di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal*” fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana proses pemberdayaan melalui pelatihan menjahit di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Indah Apriliyani, “*Pemberdayaan Penyandang Cacat melalui Pelatihan Menjahit di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal*”, Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2017. hlm 78

Letak persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti model pemberdayaan khusus pada penyandang disabilitas, akan tetapi pemberdayaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Indah Apriliyani fokus analisis pemberdayaan melalui pelatihan menjahit yang dilakukan di Loka Bina Karya Kabupaten Tegal. Sedangkan penelitian milik peneliti yaitu peran dalam melakukan pemberdayaan di sektor sosial ekonomi seperti kerajinan tangan yang dilakukan oleh Yayasan Pilar di Kabupaten Purbalingga.

*Kedua*, skripsi ini ditulis oleh Mia Maisyatur Rodiah 2014 dengan penelitian tentang “*Pemberdayaan Kelompok Disabilitas melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisma Ceshire Jakarta Selatan*”. Fokus penelitian ini membahas pelaksanaan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan *handicraft* dan *woodwork*.<sup>9</sup>

Letak persamaan penelitian peneliti dengan peneliti adalah sama-sama meneliti pelaksanaan pemberdayaan pada penyandang disabilitas, akan tetapi perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mia Maisyatur Rodiah hanya fokus pada keterampilan *handicraft* dan *woodwork*. Sedangkan penelitian milik peneliti adalah fokus cukup luas yaitu peran pemberdayaan disegala bidang ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Pilar di Purbalingga.

*Ketiga*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ani Suwarti dan Lela Hindasah dengan judul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di*

---

<sup>9</sup> Mia Maisyatur Rodiah “*Pemberdayaan Kelompok Disabilitas melalui Kegiatan Keterampilan Handicraft dan Woodwork di Yayasan Wisma Ceshire Jakarta Selatan*” (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)hlm 58



*Indonesia*” fokus penelitian ini membahas melakukan *pilot project* implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Letak persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemberdayaan disabilitas, pemberdayaan penelitian yang dilakukan oleh Ani Suwarti dan Lela Hindasah memfokuskan pada *assessment* bagaimana konsep dan pendekatan pada pemberdayaan ekonomi secara luas bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada peran lembaga dalam pemberdayaan yang sudah dilakukan pada penyandang disabilitas.

*Keempat*, tesis yang ditulis oleh Citra Gaffara TR dengan judul “*Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Karang Patihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur)*”. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana peran yang dilakukan Pemuda Karang Taruna dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Sebagai fasilitator dan koordinator dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan kontribusi pada peningkatan pendapat ekonomi penyandang disabilitas terhadap ketahanan ekonomi keluarga.<sup>11</sup> Letak persamaan dalam penelitian ini sama-sama fokus pada pemberdayaan peningkatan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah peran yang dilakukan oleh Yayasan Pilar dalam melakukan

---

<sup>10</sup> Ani Suwarti dan Lela Hindasah dengan judul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013) hlm, 46

<sup>11</sup> Citra Gaffara TR dkk, *Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga* (Universitas Gajah Mada, 2016) hlm 39

pemberdayaan ekonomi pada Penyandang Disabilitas melalui Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga.

## F. Kajian Teori

### 1. Pemberdayaan

#### 1. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*, secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan, secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan oleh istilah pengembangan. Bahkan istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.<sup>12</sup>

Salah satu definisi pemberdayaan tersebut juga disampaikan oleh Depaa Narayan dalam Sunyoto Usman sebagai berikut :<sup>13</sup> Pemberdayaan adalah perluasan asset dan kemampuan orang miskin untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi dengan mempengaruhi control, mempertahankan akuntabilitas, intuisi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Setidaknya ada tiga hal penting yang terdapat dalam definisi tersebut. *Pertama*, pemberdayaan menekankan ekspansi asset dan kemampuan kelompok miskin. *Kedua*, perluasan asset dan kemampuan tersebut digerakkan sekaligus difasilitasi dengan cara-cara yang mengedepankan partisipasi, negosiasi, akuntabilitas dan *risk-sharing*. Dengan kata lain proses perluasan dan kemampuan tersebut dilakukan melalui mekanisme atau

---

<sup>12</sup> Nani Machendra Wati dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam : dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, Hal 41-42.*

<sup>13</sup> Sunyoto Usman. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Pustaka Belajar, Yogyakarta. Hal 51-53.

sistem *delivery* yang bersifat konstruktif (membangun), bukan untuk kepentingan yang bersifat *destruktif* (merusak). Cara-cara semacam ini sangat penting, karena berbagai pengalaman memperlihatkan bahwa intervensi terhadap kelompok miskin yang dilakukan pihak luar (pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor) acap kali justru memperlihatkan wajah yang kreatif tetapi *destruktif*. *Ketiga*, fokus pemberdayaan dalam kelompok miskin. Kelompok ini memiliki keterbatasan akses pada sumber daya (*resources*) ekonomi dan politik. Mereka hidup dalam kondisi kehilangan akses pada kebutuhan dasar.

Menurut Suharto pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusus kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli juga mengemukakan definisi pemberdayaan, seperti Parson mengatakan, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dirinya sendiri maupun kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>14</sup>

Jika diruntut dari pengertian pemberdayaan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan adalah proses penguatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dengan upaya pengembangan masyarakat dengan menggali potensi dan bakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individual. Melalui berbagai adanya kegiatan ataupun pelatihan sesuai dengan apa potensi yang dibutuhkan. Selain itu diharapkan mereka dapat lebih aktif dan bisa berpartisipasi di dalam masyarakat, serta dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan secara bersama, dapat saling sinergi dan berpengaruh dalam lingkungannya, serta mampu menyelesaikan segala permasalahan yang muncul, agar nantinya menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama sesuai dengan harapan.

## 2. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Proses, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalanya suatu peristiwa dari awal hingga akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, perbuatan, pekerjaan, dan tindakan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses memiliki arti runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Proses juga berarti

---

<sup>14</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama, Bandung, 2009. Hal 58-59.

<sup>15</sup> J.S. Badudu dan Sutan Muhamad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1092.

sebuah rangkaian tindakan, perbuatan, dan pengolahan yang menghasilkan produk.<sup>16</sup> Menurut Wrihatnolo yang di kutip oleh Aziz Muslim dalam buku *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat* mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan “proses menjadi” dan bukan “proses instan” sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tenaga yang cukup melelahkan. Proses panjang yang akan dilalui fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayagunaan.<sup>17</sup> Jadi proses Pemberdayaan yang dilakukan oleh fasilitator atau agen perubahan (*agen of change*) dalam rangka untuk membantu menyadarkan, memberikan kapasitas, serta mendayagunakan masyarakat sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan sendiri, mengorganisir dan manajemen sumber daya yang ada menurut praksara sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Langkah dalam pemberdayaan masyarakat disebut juga tahapan.

Tahapan yang dimaksud disini adalah tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut, seperti dikutip dari buku *Pemberdayaan Masyarakat*:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 703.

<sup>17</sup> Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012). hlm. 31.

<sup>18</sup> - Dedeh Maryani dkk, *Pemberdayaan Masyarakat - Google Buku*, ”, diakses 19 January 2023.

## 1. Assesment (pengkajian)

Tahap persiapan mengharuskan fasilitator mempersiapkan lapangan atau tempat dilakukannya pemberdayaan dan petugas selaku orang yang menjalankan program. Individu atau kelompok masyarakat dapat melakukan tahap pengkajian atau penilaian. Petugas yang dikira mampu untuk diberdayakan. Hal ini dilakukan untuk memilih kelompok atau individu terbaik yang akan diberdayakan. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan berjalanya program pemberdayaan berjalan tanpa hambatan atau diminimalisir kegagalannya karena sudah dipersiapkan pelaku dan tempatnya.

## 2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Langkah dalam penyusunan rencana kegiatan merupakan tahapan yang dijalankan dalam mendalami proses pemberdayaan. Petugas akan berfungsi ditingkat ini sebagai agen perubahan atau agen pertukaran. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mempertimbangkan sejumlah inisiatif rencana yang berbeda, serta keuntungan dan kerugiannya agar rencana yang dipilih merupakan langkah terbaik. Pilihan ini kemudian dibandingkan untuk menentukan program mana yang paling efisien. Petugas akan mengambil peran untuk menyusun program. Lingkungan diantisipasi untuk dapat mempertimbangkan banyak inisiatif alternatif, serta keuntungan dan kerugiannya. Perangkat lunak yang paling efisien kemudian dipilih dari antara pilihan ini.

### 3. *Implementation* (pelaksanaan)

Pelaksanaan program yang sudah direncanakan dan dikaji menjadi langkah utama dilapangan. Dalam langkah ini pencegahan hambatan dalam pelaksanaan sangat diperlukan. Masyarakat harus memahami maksud, tujuan, dan sasaran program selama tahap pelaksanaan.

### 4. Tahap Evaluasi

Langkah pemantauan bagi warga dan fasilitator program pemberdayaan adalah evaluasi. Berjalanya tahap evaluasi ini berfungsi juga untuk lebih mendalami ketika ditemukan masalah dalam implementasi program. Pihak ketiga juga diperlukan kehadirannya untuk memantau dan diminta sudut pandang lain dalam melihat implementasi program yang sudah berlangsung.

### 5. Tahap Terminasi

Proyek harus berakhir pada titik ini. Hal ini karena individu yang diberdayakan sudah memiliki kapasitas untuk memperbaiki diri dari keadaan yang tidak menguntungkan sebelumnya. Dengan kata lain, mereka dapat memastikan bahwa mereka dan keluarganya memiliki kehidupan yang sudah meningkat. Menyelesaikan suatu program juga didukung dengan pembuatan laporan perjalanan program.

### 3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya pada kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi dalam diri mereka sendiri), ataupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- 1) Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 2) Kelompok lemah secara khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay, dan lesbian, masyarakat terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.<sup>19</sup>

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menguatkan diri dari dalam terhadap segala bentuk penindasan dengan berbagai upaya perbaikan. Khususnya didalam masyarakat atau kelompok tertentu yang mengalami ketidak mampuan untuk berdaya, baik karena situasi eksternal maupun internal. Maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam perbaikan sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Hal 60.



1) Perbaikan Kelembagaan (Better Institution)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan semua akan memperbaiki sebuah kelembagaan yang ada, termasuk tambah luasnya pengembangan jejaring kemitraan usaha yang dibutuhkan.

2) Perbaikan Usaha (Better Businer)

Perbaikan aksesibilitas yang memadai, perbaikan sumber daya manusia (pendidikan), kegiatan-kegiatan dalam pengembangan kelembagaan, diharapkan memberi dampak dalam perbaikan bisnis yang dilakukan.

3) Perbaikan Pendapatan (Better Income)

Dengan perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan mempengaruhi hasil pendapatan yang diperolehnya menjadi lebih baik.

4) Perbaikan Lingkungan (Better Environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan dalam segi fisik maupun sosial, karena kerusakan lingkungan kadang terjadi karena sebab kemiskinan atau pendapat yang terbatas tidak mencukupi kebutuhan.

5) Perbaikan Kehidupan (Better Living)

Membaiknya keadaan lingkungan dan pendapatan semakin tinggi, diharapkan akan memperbaiki keadaan taraf setiap keluarga dan masyarakat.

#### 6) Perbaiki Masyarakat (Better Community)

Keadaan kehidupan yang membaik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan merubah kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>20</sup>

#### 4. Indikator Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Schuler, Hasemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks keberdayaan.<sup>21</sup>

1) Kebebasan mobilitas : kemampuan individu yang mempunyai kebebasan untuk pergi dari tempat tinggalnya ke suatu tempat, seperti pasar, mall. Tingkat mobilitas seperti ini dianggap tinggi jika individu mampu untuk pergi sendirian.

2) Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu, dll). Kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, bedak, sampo, dll). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat mempunyai kebebasan keputusan atas dirinya sendiri tanpa meminta izin

---

<sup>20</sup> Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung. 2015. Hal 153-154.

<sup>21</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Hal 63-66.

kepada siapapun. Terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- 3) Kemampuan untuk membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, koran, majalah, pakaian keluarga dll. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam perbuatan keputusan-keputusan rumah tangga : mampu membuat keputusan secara sendiri maupun secara bersama mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha dll.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : responden ditanya mengenai dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya ; yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja luar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik : mengetahui nama salah satu pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya surat nikah dan hukum-hukum waris.

- 7) Keterlibatannya dalam kampanye dan protes-protes : seorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan, atau penyalahgunaan polisi dan pegawai pemerintah.
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

## 2. Penyandang Disabilitas

### a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah “disabilitas” sejauh ini masih terjadi perdebatan dalam penggunaannya. Di Indonesia secara umum terdapat dua pandangan untuk menyebut kelompok ini. Pertama, kelompok yang menggunakan istilah “difabel”. Berasal dari kata “difable” yaitu *different ability people* individu yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kedua, kelompok yang menggunakan istilah “disabilitas”. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris, yakni “*disability*”. Di Indonesia istilah difabel lebih banyak dipakai pada aktifitas yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah (terutama Solo). Istilah disabilitas lebih populer pada aktifitas di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya.

Merujuk pada Undang-Undang yang ada, istilah yang dipakai adalah disabilitas. Umumnya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum dan kebijakan lebih banyak dipakai istilah disabilitas, sedangkan istilah difabel lebih banyak digunakan dalam kapasitas sebagai sebuah gerakan. Menimbang berbagai faktor tersebut, untuk keperluan ranah studi ilmiah, istilah disabilitas yang akan dipakai pada penelitian ini.

Merujuk pada UU No 8 Tahun 2016 Pasal 1, disabilitas dapat dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Pasal 1 mengatakan bahwa penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki kelainan atau penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

b. Ragam Penyandang Disabilitas

Mengacu pada UU No 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas dibagi menjadi dalam tiga kategori, yakni disabilitas intelektual, disabilitas fisik dan disabilitas sensorik. Untuk mengetahui macam-macam maka peneliti akan menjelaskan kecacatan yang terbagi ke dalam empat jenis :

#### 1) Penyandang Disabilitas Fisik

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, parapalegi, *cerebral palsy (cp)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

#### 2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

#### 3) Penyandang Disabilitas Mental

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain :

a) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian ; dan

b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

#### 4) Penyandang Disabilitas Sensorik

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

### 3. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan bisa dilakukan dengan melalui *intrapeneurship* dan *entrepreneuishop*. Pemberdayaan yang sifatnya melalui *intrapeneurship* adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas agar bisa diterima dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan pemberdayaan melalui *entrepreneuishop* adalah pendidikan bagaimana penyandang disabilitas mamapu berdaya mempunyai usaha sendiri secara mandiri.

Selain itu, menurut Nuryoso usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sarana pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.<sup>23</sup>

Teori pemberdayaan penyandang disabilitas adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan pendekatan yang inklusif untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat mengambil peran aktif dalam masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan kesetaraan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Ada beberapa teori pemberdayaan penyandang disabilitas yang selama ini dikenal. Pertama, Model Medis, model ini melihat disabilitas sebagai kondisi medis yang harus diobati atau dikelola. Pemberdayaan dalam konteks ini berfokus

---

<sup>23</sup> Dwi Pratiwi Kurniawati, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No 2, 2013, Hal 9-14.

pada penyediaan perawatan kesehatan dan layanan rehabilitasi. Kedua, Model Sosial: pemberdayaan model ini fokus ke faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi hambatan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Ketiga, pendekatan Hak Asasi Manusia, pemberdayaan dalam konteks ini melibatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta menghapus diskriminasi dan stigma yang mereka hadapi. Terakhir, Pendekatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, perawatan kesehatan, dan dukungan sosial.

#### 4. **Dampak Pemberdayaan**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif atau positif).<sup>24</sup> Sedangkan dampak dalam Undang-Undang lingkungan hidup pasal 1 butir 9 merupakan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan yang mengenai pembangunan ekonomi. Dampak menurut Surito Hardoyo yaitu tidak lepas dari dampak yang bersifat primer dan sekunder. Dampak primer adalah perubahan lingkungan yang disebabkan secara langsung oleh suatu kegiatan, sedangkan dampak yang bersifat sekunder yaitu perubahan lingkungan terjadi secara tidak langsung dari kegiatan atau perubahan yang terjadi sebagai kelanjutan. Dampak juga terdapat dua macam yaitu dampak positif dan negatif. Dampak yang sifatnya positif yaitu perubahan yang terjadi mampu menciptakan keuntungan. Sedangkan

---

<sup>24</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/dampak.html>



dampak negatif merupakan perubahan yang terjadi menimbulkan kerugian.<sup>25</sup>

Menurut Ali Murtolo dampak biasanya dikategorikan dalam aspek sosial ekonomi dan sosial budaya:<sup>26</sup>

a. Sosial Ekonomi

Dampak sosial ekonomi bisa dilihat dari hal bersifat positif dan negatif. Yang positif bisa dilihat dari aspek:

1. meningkatnya kelayakan dan kenyamanan masyarakat,
2. terbukanya kesempatan kerja,
3. peningkatan pendapatan masyarakat.

Sedangkan dampak negatif meliputi:

1. menurunnya pendapatan,
2. meningkatnya biaya operasional,
3. melemahnya jaringan sosial.<sup>27</sup>

b. Sosial Budaya

Untuk mengetahui suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka perlu diketahui sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan. Dampak sosial budaya ini dilihat dari perubahan

---

<sup>25</sup> Sudarmo Ali Murtolo, *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat*, Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Hal 87.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 112.

<sup>27</sup> Aji Wahyu Heriyanto, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*, *Economics Development Analysis Journal*, Vol 1-2, 2012, Hal 3.

yang terjadi akibat dari aktifitas masyarakat yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi:<sup>28</sup>

1. perubahan pada tingkat partisipasi masyarakat (bertambahnya atau berkurangnya penduduk),
2. penemuan-penemuan baru,
3. pertentangan (*conflict*),
4. kegotong royongan masyarakat yang berhubungan antara kegiatan dengan budaya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti adalah Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian karena peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai aktivitas pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Yayasan Pilar, serta ingin mengetahui peran pemberdayaan dan mengetahui hasil pemberdayaan, sehingga dengan perspektif tersebut dapat memberikan sebuah wacana pemberdayaan penyandang disabilitas yang mampu dijadikan acuan ataupun bahan evaluasi bagi Yayasan Pilar dan yayasan sosial lainnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengambil data-data primer dari lapangan. Penelitian tersebut bermaksud

---

<sup>28</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Hal 299.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih pendekatan ini dikarenakan beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>30</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini meliputi: Proses pemberdayaan penyandang disabilitas dan dampak terhadap penyandang disabilitas.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber (seseorang) dalam memperoleh keterangan penelitian dalam mencari sumber informasi dan data sesuai dengan masalah yang ingin diteliti.<sup>31</sup> Dengan demikian, subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Pilar Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>29</sup> Husaini Usman dan purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*. (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009). hlm. 4.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remasa Rosada Karya, 2010, Hal 9-10.

<sup>31</sup> Tatang M.Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : CV Rajawali, 1986, Hal 92.

terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, baik pemerintah maupun swasta.

## **5. Teknik Penentu Informan**

Cara memperoleh Informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *Purposif sampling*. *Purposif sampling* ini digunakan untuk menentukan seseorang menjadi sampel atau tidaknya didasarkan pada tujuan tertentu. Pada penelitian ini *Purposif sampling* digunakan peneliti dalam memilih informan berdasarkan kecenderungan posisi dengan akses tertentu, yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang baik. Bahkan didalam pelaksanaan pengumpulan data sesuai dengan sifat penelitian yang lentur dan terbuka informan dan jumlahnya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data.<sup>32</sup> kekuatan pengambilan sampel dengan maksud tertentu terletak pada penyeleksian kasus yang dikaji dengan mendalam. Jadi dalam mencari data mengenai proses dan dampak pemberdayaan penyandang disabilitas ini penulis memnentukan sendiri informannya berdasarkan tujuan tertentu. Misalkan dampak pemberdayaan penulis menemui langsung penyandang disabilitas yang pernah mendapatkan pemberdayaan yang dilakukan oleh yayasan pilar.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Secara umum, teknik

---

<sup>32</sup> Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dasar dan Terapanya dalam Penelitian*, Edisi 2, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 64.

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi.<sup>33</sup>

**a. Teknik Wawancara**

Wawancara diartikan sebagai percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang bertugas memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan.<sup>34</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan atau bertanya secara langsung kepada informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.<sup>35</sup> Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara yang terbuka dan terstruktur. Terbuka maksudnya para subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Sedangkan wawancara terstruktur adalah hal-hal akan diutarakan telah terstruktur dan telah ditetapkan secara rinci. Dan pada wawancara terstruktur juga pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.<sup>36</sup>

**b. Teknik Observasi**

Teknik observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan secara langsung dengan maksud untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat,

---

<sup>33</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Perdana Group, 2011, Hal 138.

<sup>34</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Hal. 118.

<sup>35</sup> Sugiharto, dkk, *Teknik Sampling*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal 17.

<sup>36</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, Hal 137.

pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, dan peristiwa.<sup>37</sup> Adapun manfaat dari observasi adalah peneliti mampu memahami konteks data secara keseluruhan dan mampu merasakan suasana dalam situasi sosial, menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkap oleh informan dalam wawancara.

### c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan tahap-tahap atau cara dalam mengumpulkan data dengan cara mencatat, menyalin, atau *mengcopy* dari arsip atau dokumen dan yang telah ditemukan dari hasil di lapangan. Peneliti dapat menyusun dokumentasi tersebut menjadi poin-poin kecil yang penting sesuai dengan data yang dibutuhkan.<sup>38</sup>

## 7. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data sangat penting dalam sebuah penelitian, yaitu untuk membuktikan keaslian data dan membangun cara memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan. Dalam penelitian ini teknik validitas data yang digunakan dengan triangulasi dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, DR. Lexy J.Moleong, M.A. menjelaskan berupa teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data tersebut diperlukan sebagai pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini triangulasi sumber dan triangulasi metode.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Hal 165.

<sup>38</sup> Waryono, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014, Hal 29.

<sup>39</sup> Lexy J.moleong,, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 330.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini melalui penggunaan sumber dicapai melalui langkah-langkah berikut: pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Ketiga, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. Keempat, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan. Kelima, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>40</sup>

Triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329), terdapat dua strategi, yaitu : *Pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. *Kedua*, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>41</sup> Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut peneliti mampu memperoleh kevalidan data sehingga dapat mengurangi keraguan terhadap data-data lapangan yang diperoleh peneliti dari beberapa informan ketika dilapangan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 332.

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 209-210.

## 8. Metode Analisa Data

Setelah data penelitian telah terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara menganalisis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajarinya.<sup>42</sup> Peneliti menggunakan model analisis interaktif. Analisis interaktif dalam pelaksanaannya melalui 3 tahapan yaitu :

### a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pengfokusan, dan transformasi data dimana data yang diperoleh peneliti di lapangan masih berupa data-data kotor. Proses tersebut dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Proses awal misalnya kerangka teori, rumusan masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama proses pengumpulan data lapangan, peneliti membuat sebuah ringkasan, kode, dan menemukan tema. Proses reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyisihkan data yang tidak perlu serta mengorganisir data tersebut agar penafsirannya bisa ditarik sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Peneliti bisa melakukan pengecekan ulang atau kroscek data dari informan lain ketika data disangsikan.

---

42



**b. Pengajian data**

Peneliti mengelompokkan beberapa hal yang serupa dalam kategori. Missal, kelompok 1,2,3 dan seterusnya. Masing-masing kelompok menunjukkan tipologi terdiri dari beberapa sub-sub tipologi yang merupakan urutan atau prioritas kejadian di lapangan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, grafik, tabel, dan bagan. Pada setiap ini penelitian memberikan penyajian data secara sistematis agar mempermudah dalam memahami interaksi antar bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga bukan berupa segmental atau fragmental yang terpisah satu dengan lainnya.

**c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi**

Tahapan ini peneliti proposisi terkait dengan prinsip logika yang kemudian mengangkatnya sebagian temuan penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan mengkaji data yang ada secara berulang-ulang, pengelompokan data yang berbentuk proposisi yang telah dirumuskan. Langkah berikutnya adalah melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan sebuah, “temuan baru “yang berbeda dengan temuan sebelumnya.

**H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri dari 4 Bab, yaitu :

**BAB I** adalah pendahuluan yang menguraikan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** menguraikan tentang gambaran umum Yayasan Pilar Purbalingga yang meliputi letak, luas dan kondisi geografis, sejarah berdiri dan perkembangan Yayasan Pilar Purbalingga, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan kegiatan Yayasan Pilar Purbalingga.

**BAB III** berisi tentang mendeskripsikan peran dan dampak dari pemberdayaan penyandang disabilitas, analisis peran dan dampak yang dilakukan oleh Yayasan Pilar Purbalingga.

**BAB IV** berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, saran, dan penutup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Yayasan Pilar merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang berkedudukan di Purbalingga. Meskipun pergerakannya tidak spesifik di isu penyandang disabilitas, akan tetapi sudah cukup banyak program-program yang terkait disabilitas. Bahkan, dapat dikatakan dominasi isu penyandang disabilitas dalam program atau kegiatan yang dilakukan organisasi cukup tinggi. Isu penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga masih belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, kehadiran lembaga yang bergerak di isu disabilitas sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi penyandang disabilitas. Keberadaan Yayasan Pilar dapat memberi warna dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Purbalingga. Yayasan Pilar merupakan salah satu aktor penting dalam gerakan isu penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, antara lain;

#### **1. Peran Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

- a. Tahapan dalam pemberdayaan dimulai dari pendataan penyandang disabilitas sebagai kelompok sasaran dan pengelompokan. Pengkajian atau assessment dilakukan dengan penggalian ide. Tahap perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan disesuaikan dengan kebutuhan dalam setiap program,

sedangkan penyusunan rencana kegiatan yang berasal dari pihak ketiga pengurus hanya membantu dalam hal teknis. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dari pengkajian, dengan tujuan untuk memberikan ketrampilan sehingga diharapkan dapat memberikan kemajuan kesejahteraan hidup bagi para penyandang disabilitas. Tahap evaluasi dijalankan oleh pengurus Yayasan ketika mendapatkan adanya potensi kemajuan, kemauan, dan ketekunan maka akan ditindaklanjuti. Tahap terminasi Yayasan melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban dan ketika ditemukan kemajuan dari penyandang disabilitas maka akan ditindaklanjuti dengan memfasilitasi.

## **2. Dampak Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan Yayasan Pilar mampu menciptakan dampak yang positif bagi penyandang disabilitas. Adapun dampak-dampak tersebut antara lain:

### **a. Dampak sosial ekonomi**

Dampak sosial ekonomi Yayasan Pilar sanggup menciptakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang selama ini belum sejahtera. Kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Purbalingga, khususnya bagi penyandang disabilitas.

### **b. Dampak sosial budaya**

Dampak sosial budaya yang didapatkan penyandang disabilitas oleh Yayasan Pilar mampu meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran berorganisasi serta bersinergi sesama penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran dan masukan dari peneliti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Beberapa saran dan masukan tersebut antara lain;

1. Adanya pendataan yang menyeluruh dan sistemik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan sejauh ini pendataan belum sistemik dan masih rancu. Pendataan sebaiknya tidak sebatas ragam disabilitas, tetapi juga data pilah yang memuat derajat disabilitasnya, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini agar menjadi pondasi dalam membuat regulasi atau kebijakan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.
2. Saran dan masukan kedua yang tidak kalah penting adalah adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta (perusahaan) dan organisasi penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan merumuskan hal-hal terbaik bagi upaya pemberdayaan penyandang disabilitas.

3. Upaya pemberdayaan penyandang disabilitas perlu didukung dengan *follow up* yang sistemik dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan dari hasil pelatihan juga masih ditemukan adanya ketidakberlanjutan atau ketidakjelasan. Misalnya pelatihan pembuatan telur asin maupun batik ecoprint yang sebatas difasilitasi atau muncul saat pameran setahun sekali di alun-alun Purbalingga. Dukungan tersebut dapat berupa akses ke pasar, permodalan, maupun kerjasama lain antara pemerintah atau lembaga dalam hal menyerap produk penyandang disabilitas.
4. Sebagai upaya memperkuat dan memperbanyak penerima manfaat sekaligus memunculkan efektifitas pemberdayaan, sekiranya Yayasan Pilar maupun pemerintah dapat melakukan *mapping* secara menyeluruh. Pemetaan ini mencakup pada prioritas jenis pelatihan, prioritas peserta, hingga analisis keberlanjutan program. Dengan harapan agar bisa maksimal dalam upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji Wahyu Heriyanto. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 1-2. 2012.
- Ani Suwarti. *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 5-1. Maret 2014.
- Aprilia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta. Bandung. 2015.
- Badan Pusat Statistika 2018. (Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia)<https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>, diakses pada tanggal 30 April 2019 pukul 19.30 WIB.
- Badan Pusat Statistika. 2018. *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Maret 2018.
- Dedeh Maryani, Ruth Roselin E. Nainggolan “Pemberdayaan Masyarakat - Google Buku.” diakses 1 Juni 2023.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1. No 4. 2013.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jakarta. 2011.  
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/dampak.html>
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Perdana Group. 2011.
- Lexy J.Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remasa Rosada Karya. 2010.
- M Supramoko. *Pengantar Eknomika Mikro*. BPFE Yogyakarta. 2013.
- Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Safei. *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*. Remaja Rosada Karya. Bandung. 2001.

- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Bandung. 2016.
- Siti Arietta. Community Based Tourism pada Masyarakat Pesisir: *Dampaknya terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi*. Jurnal Dinamika Maritime. Vol 2-1. September 2010.
- Siti Kurnia Wisniastuti dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marjinal*. Pustaka Pelajar. 2015.
- Sudarmo Ali Murtolo. *Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995.
- Sugiharto, dkk. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sunyoto Usman. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Tatang M. Amin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali. 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Waryono, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Wawancara dengan Aang dilaksanakan tanggal 2 Mei 2021.
- Wawancara dengan Angga dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021.
- Wawancara dengan Eni dilaksanakan tanggal 8 Mei 2023.
- Wawancara dengan Gunarti dilaksanakan tanggal 12 Mei 2021.
- Wawancara dengan Sigit dilaksanakan tanggal 13 Mei 2023.
- Wawancara dengan Sri wahyuni dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021.